



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
**PENANGGULANGAN
KEMISKINAN**

—  BERBASIS  —
KEADILAN
PADA MASYARAKAT PEDESAAN



—  —
*Keadilan sebagai landasan,
kebijakan sebagai jalan,
kesejahteraan sebagai tujuan.
—  —

Margaretha Movaldes Da Maga Bapa, ST, M.Eng
Prof. Dr. Liliweri Aloysius, M.S
Dr. Ajis S. A. Djaha, M.Si
Dr. Nursalam, M.Si

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KEADILAN PADA MASYARAKAT PEDESAAN

Penulis:

Margaretha Movaldes Da Maga Bapa, ST, M.Eng

Prof. Dr. Liliweri Aloysius, M.S

Dr. Ajis S. A. Djaha, M.Si

Dr. Nursalam, M.Si



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keadilan Pada Masyarakat Pedesaan

Margaretha Movaldes Da Maga Bapa, ST, M.Eng
Prof. Dr. Liliweri Aloysius, M.S
Dr. Ajis S. A. Djaha, M.Si
Dr. Nursalam, M.Si

TATA LETAK:

Sari

DESAIN SAMPUL:

Adhar

SUMBER:

www.tdjpublisher.com

ISBN:

978-634-279-160-8

CETAKAN PERTAMA:

Juni 2026

UKURAN:

iii + 261 Hal; 15,5 cm x 23 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022

TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER

Jl. Timor Raya No. 130 B, Kota Kupang, NTT

E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keadilan pada Masyarakat Pedesaan” dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun sebagai upaya untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berorientasi pada prinsip keadilan, khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional, sehingga memerlukan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesempatan, akses terhadap sumber daya, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Melalui buku ini, pembaca diajak untuk memahami berbagai konsep, strategi, dan praktik implementasi kebijakan yang dapat mendukung terciptanya pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan di wilayah pedesaan. Diharapkan buku ini dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi, maupun pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap isu kemiskinan dan pembangunan masyarakat.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan di masyarakat pedesaan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II GOVERNANCE	10
A. Kolaborasi	11
B. Collaborative Governance.....	12
C. Model Collaborative Governance	13
BAB III KEUANGAN DAERAH	34
A. Kebijakan Desentralisasi Fiskal	34
B. Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi	36
BAB IV COLLABORATIVE GOVERNANCE UNTUK MEMINIMALISASI POTENTIAL LOSS	37
A. Penggerakan Prinsip Bersama (Principled Engagement)	134
B. Motivasi Bersama (Shared Motivation)	157
C. Kapasitas Untuk Melakukan Tindakan Bersama (Capacity For Joint Action).....	175
BAB V FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT COLLABORATIVE GOVERNANCE	196
A. Faktor Pendukung	196
1. Komitmen Pemimpin dan Regulasi (Faktor Kunci) ..	196
2. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Digital	200
3. Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Aparat (SDM).....	201
B. Faktor Penghambat.....	202
1. Desain Kelembagaan dan Regulasi Yang Lemah.....	203

2. Jaringan Aktor dan Dinamika Kekuasaan	204
3. SDM, Kapasitas, Infrastruktur dan Insentif.....	206
4. Proses Kolaborasi dan Relasi Aktor.....	208
5. Konteks Politik dan Konflik.....	210
BAB VI MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE UNTUK MEMINIMALISASI POTENTIAL LOSS	213
DAFTAR PUSTAKA	223

